



PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA *CORPORATE FAILURE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG *LISTING* DI BEI

Wahyu Setyawati Utami, Indira Januarti¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to analyze and provide empirical evidence the effect of corporate governance characteristics like outside directors, outside ownership, audit opinion, remuneration of boards member, independent audit committee, and board size on probability of corporate failure.

The population in this study consists of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. Observation period was 2011-2012. Data was collected by using a purposive sampling method. The total number of samples is 147 companies, consist of 57 failed companies and 90 non-failed companies. The research data were analyzed with logistic regression.

The empirical result of this study show that outside ownership and audit opinion are significantly affect the probability of corporate failure. While outside directors, remuneration of boards member, independent audit committee, and board size has no effect on probability of corporate failure.

Keyword: corporate governance characteristics, probability of corporate failure, agency theory, logistic regression

PENDAHULUAN

Corporate governance sangat penting diaplikasikan untuk menghindari praktik-praktik curang dari manajemen perusahaan. Lebih lanjut menurut Lakshan dan Wijekoon (2012) pada masa lampau banyak terjadi kecurangan bisnis sebagai akibat tidak diterapkannya *corporate governance* dengan baik. Perkembangan *corporate governance* tidak jauh dari skandal mendunia yang dilakukan oleh Enron, WorldCom, HealthSouth dan ArthurAnderson. Bahkan saat ini, isu *corporate governance* ini juga sedang mengemuka di Indonesia, apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998. Belum adanya konsep tata kelola yang baik dianggap sebagai penyebab runtuhnya perusahaan-perusahaan di masa krisis tersebut (Sastriana, 2013).

Lemahnya *corporate governance* dapat meningkatkan probabilitas terjadinya *corporate failure* sekalipun untuk perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik. Tindakan pencegahan dan faktor-faktor penyebab *corporate failure* perlu diidentifikasi sejak dini. Salah satunya dengan penggunaan karakteristik-karakteristik *corporate governance* sebagai prediktor atas kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

Penerapan *corporate governance* harus dilaksanakan semua pihak tak terkecuali oleh dewan komisaris atau manajer puncak perusahaan. Secara hukum, pengelolaan perusahaan dipegang oleh dewan komisaris yang bertugas melayani kepentingan perusahaan di atas kepentingan mereka sendiri dan manajemen perusahaan. Untuk itu, perlu adanya komisaris independen yang netral dan tidak memihak siapapun dalam perusahaan. Menurut Wagner (1998), dewan komisaris yang didominasi oleh komisaris independen akan jauh lebih baik untuk mewujudkan efektivitas manajerial dan akan mengurangi probabilitas terjadinya *corporate failure*.

Adanya pemegang saham independen memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Peningkatan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen akan memberikan pengaruh

¹ *Corresponding author*

yang besar terhadap pengawasan manajemen, sehingga tidak akan terjadi *financial fraud* yang dapat memicu terjadinya *corporate failure*. Keberadaan pemegang saham ini dapat menekan manajemen agar tidak berlaku hanya untuk kepentingan pribadinya, sehingga kecurangan bisa diminimalisir.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan. Komite audit adalah sub-komite pada dewan komisaris yang memberikan komunikasi formal antara dewan komisaris, sebagai pengawas internal, dengan auditor eksternal. Dengan adanya komite audit ini dapat menjauhkan konflik kepentingan antara dewan komisaris, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan *corporate governance* yang lain termasuk perhatian terhadap jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan dewan direksi. Sesuai penerapan *corporate governance* yang baik, pembayaran untuk dewan komisaris tidak boleh berlebihan dan harus dibatasi. Remunerasi ini ditentukan berdasarkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Main *et al.* (1996) menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan antara total remunerasi dewan direksi dengan kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan laporan keuangan yang baik akan menjauhkan perusahaan dari opini modifikasi. Opini audit memberikan informasi keuangan dan kualitas manajerial pada perusahaan. Dengan demikian, opini audit bisa digunakan sebagai indikator kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan.

Penerapan lain dari *corporate governance* adalah jumlah dewan direksi. Ukuran ini menentukan kualitas pengendalian dan pengawasan manajerial. Menurut Jensen (1993), suatu dewan direksi yang baik setidaknya harus terdiri dari tujuh atau delapan anggota. Jumlah tersebut dinilai sudah efektif, sehingga dewan direksi dapat menjalankan fungsinya secara efisien dan dengan begitu akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik *corporate governance* terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
2. Apakah *outside ownership* memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
3. Apakah opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
4. Apakah remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
5. Apakah keberadaan komite audit independen memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
6. Apakah ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori utama yang berhubungan dengan konsep *corporate governance* adalah teori agensi (*agency theory*). Teori ini muncul terkait hubungan antara prinsipal dan manajemen perusahaan, karena dalam *corporate governance* yang baik, hubungan kedua pihak tersebut menjadi sorotan utama. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, dimana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi atau akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kepentingan orang lain. Teori keagenan menyatakan sulit untuk memercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*), sehingga diperlukan *monitoring* dari pemegang saham (Copeland dan Weston, 1992).

Monitoring dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini harus orang yang netral dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada konflik kepentingan (Brigham dan Gapenski, 1996) antara (1) Manajer dan pemilik perusahaan (2) Manajer dan bawahannya, (3) Pemilik perusahaan dan kreditor. Pihak ketiga dihadirkan untuk menjadi penengah dan pemantau atas

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tersebut. Pengawasan oleh pihak independen harus dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Penyelewengan wewenang yang dilakukan pihak manajemen sebagai agen perusahaan bisa membawa perusahaan ke arah kegagalan. Terjadinya *corporate failure* bisa disebabkan karena agen yang berlaku curang untuk kepentingannya pribadi. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai sarana *monitoring* hubungan prinsipal dan agen serta untuk membatasi perilaku para pemangku kepentingan adalah dengan penerapan *corporate governance*.

Komisaris Independen dan *Corporate Failure*

Dalam perspektif keagenan, kemampuan dewan komisaris dalam mekanisme pengawasan yang efektif tergantung pada independensinya terhadap manajemen (Beasley, 1996). Independensi dewan komisaris ini terlihat dari proses kerjanya berdasarkan kepentingan perusahaan. Komisaris independen dapat bertindak mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan pengarahan kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan dengan tata kelola yang baik atau *good corporate governance* (Fama dan Jensen, 1983).

Keanggotaan dewan komisaris yang didominasi oleh pihak-pihak dari luar perusahaan dapat meningkatkan independensi dari anggota dewan komisaris. Teori agensi menyatakan semakin tinggi proporsi komisaris independen maka pengawasan kepada manajemen perusahaan juga semakin ketat. Seorang komisaris independen harus mampu menolak pengaruh buruk dan segala bentuk intervensi pihak manajemen sehingga kebijakan dan keputusannya dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan.

Proporsi komisaris independen berhubungan negatif dengan kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Semakin besar prosentase dewan komisaris independen, maka akan meminimalkan kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya corporate failure.

Outside Ownership* dan *Corporate Failure

Persebaran konsentrasi kepemilikan perusahaan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen perusahaan. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan (Wardhani, 2006). *Outside Ownership* dalam penelitian ini merupakan gabungan dari kepemilikan institusi dan kepemilikan publik.

Pada teori agensi, pemisahan fungsi pengelolaan dengan kepemilikan perusahaan dapat meminimalkan kecurangan sebagai akibat dari benturan kepentingan yang dimiliki. Jumlah kepemilikan saham oleh pihak independen yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dapat mengurangi potensi kegagalan perusahaan.

Kepemilikan oleh institusi dan kepemilikan publik dapat meningkatkan kekuatan fungsi *monitoring*, karena pihak independen sebagai pemegang saham tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan sehari-hari maka agar tidak dirugikan, pemegang saham akan mengawasi kinerja manajer dengan ketat sehingga manajer lebih berhati-hati dan tidak ceroboh dalam bertindak, terutama dalam hal pengambilan keputusan utang agar terhindar dari resiko gagal bayar. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Outside ownership berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya corporate failure.

Opini Audit dan *Corporate Failure*

Opini audit mencerminkan kondisi kewajaran laporan keuangan dan kondisi manajerial yang berguna sebagai suatu sinyal mengenai kondisi perusahaan. Pada situasi tertentu, auditor dapat menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian, tetapi dengan kata-kata yang berlainan

dari laporan wajar tanpa pengecualian. Laporan tersebut adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan (Arens *et al.*, 2008)

Opini audit dapat digunakan sebagai indikator terjadinya kegagalan dalam perusahaan. Opini modifikasi yang dinyatakan oleh auditor ada hubungannya dengan sisi negatif status perusahaan (Lakshan dan Wijekoon, 2012). Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Opini audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya corporate failure.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan *Corporate Failure*

Remunerasi harus merefleksikan pengalaman dan tingkat tanggungjawab dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Bila kinerja perusahaan menunjukkan suatu peningkatan maka remunerasi juga akan meningkat. Besarnya remunerasi ini sangat tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Perusahaan harus memberikan remunerasi yang memadai kepada dewan komisaris agar fungsi-fungsi dewan komisaris dapat berjalan dengan semestinya. Dalam teori keagenan, untuk mendapatkan remunerasi yang besar, dewan komisaris bisa saja melakukan penekanan terhadap pihak perusahaan. Adam Smith pernah meramalkan bahwa akan selalu ada kelalaian dan pelimpahan dalam pengelolaan perusahaan karena pihak direksi mengelola uang pihak lain. Hal ini adalah dasar dalam teori agensi modern (Copp, 2011). Secara sederhana, pihak dewan komisaris dianggap bertindak rasional dan maka dari itu akan tergoda untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, terutama jika mereka tidak puas terhadap remunerasi yang dibayarkan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Remunerasi dewan komisaris independen dan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya corporate failure.

Komite Audit Independen dan *Corporate Failure*

Keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Pada teori agensi, adanya komite audit dapat meminimalkan masalah keagenan, dimana dalam hal ini komite audit bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan perusahaan yang dapat mencerminkan tingkat penerapan *corporate governance* yang baik. Keberadaan komite audit akan menekan manajemen agar menghasilkan laporan keuangan yang baik tanpa adanya manipulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lakshan dan Wijekoon (2012) memberikan hasil bahwa keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Tidak adanya komite audit dalam perusahaan yang gagal, menekankan bahwa tidak ada mekanisme pengawasan untuk proses pelaporan keuangan perusahaan dan buruknya kredibilitas dari laporan keuangan auditan.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Komite audit independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya corporate failure.

Ukuran Dewan Direksi dan *Corporate Failure*

Dewan direksi juga merupakan roda penggerak dalam operasional perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah anggota dalam susunan kepengurusan dewan direksi perusahaan dapat memengaruhi keefektifan peran dewan direksi dalam mengelola perusahaan (Lakshan dan Wijekoon, 2012). Pengaturan mengenai ukuran dewan direksi terdapat dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dimana jumlah minimal keanggotaan dewan direksi yang disyaratkan dalam perusahaan yaitu minimal 2 (dua) orang.

Menurut Jensen (1993), suatu direksi setidaknya berisi sekitar tujuh hingga delapan orang sehingga dewan direksi bisa efektif dan dapat menjalankan peran pengendaliannya secara efisien, untuk peningkatan kinerja perusahaan. Di sisi lain, diekspektasikan juga bahwa perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang lebih besar akan mengurangi kemungkinan untuk gagal karena akuntabilitas dari dewan direksi yang lebih baik (Lamberto dan Rath, 2008). Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya corporate failure.

METODE PENELITIAN

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *corporate failure*. Pengukuran *corporate failure* menggunakan variabel dummy, yaitu nilai satu (1) untuk *failed companies* yaitu perusahaan mengalami defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih negatif (Lakshan dan Wijekoon, 2012) dan/atau mengalami *debt default* (Irfana, 2012) dalam satu periode pelaporan dan nilai nol (0) untuk *non-failed companies* yaitu perusahaan yang tidak mengalami defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih positif (Lakshan dan Wijekoon, 2012) dan/atau tidak mengalami *debt default* (Irfana, 2012) dalam satu periode pelaporan. *Failed companies* dan *non-failed companies* dikelompokkan berdasarkan sektor industri dan ukuran aset sama.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris independen
Pengukuran variabel komisaris independen dalam penelitian ini yaitu melalui persentase atau proporsi jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris perusahaan (Lakshan dan Wijekoon, 2012).
- b. *Outside ownership*
Variabel *outside ownership* dalam penelitian ini ditentukan dari persentase jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan publik (Lakshan dan Wijekoon, 2012).
- c. Opini audit
Variabel opini audit dinyatakan dengan variabel dummy. Dimana nilai 1 untuk opini modifikasi dan 0 untuk *unqualified opinion* dan *unqualified opinion with explanatory language* (Lakshan dan Wijekoon, 2012).
- d. Remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi
variabel remunerasi diukur berdasarkan rasio dari remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap besarnya beban usaha perusahaan (Lakshan dan Wijekoon, 2012)
- e. Komite audit independen
Jumlah anggota komite audit independen dinyatakan dengan variabel dummy, dimana nilai 1 untuk jumlah anggota komite audit independen sama dengan atau kurang dari tiga orang dan nilai 0 untuk jumlah lebih dari tiga orang.
- f. Ukuran dewan direksi
Variabel ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah total direktur dalam susunan keanggotaan dewan direksi (Lakshan dan Wijekoon, 2013).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2012. Penentuan sampel menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2011-2012 untuk alasan keterbaruan dan merupakan perusahaan manufaktur.
2. Kategori *failed companies* yaitu perusahaan yang mengalami defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih negatif dan/atau mengalami *debt default* dalam satu periode pelaporan, sedangkan *non-failed companies* adalah perusahaan yang tidak mengalami defisiensi modal, memiliki laba positif, dan tidak mengalami *debt default* dalam satu periode pelaporan. Perusahaan *failed companies* dan *non-failed companies* dikelompokkan berdasarkan industri yang sama serta memiliki ukuran aset yang sama.
3. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan yang berisi data lengkap mengenai *corporate governance*, yang merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2012 dalam

situsnya www.idx.co.id dan tersedia di database Pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode regresi logistik (*logistic regression*). Penggunaan metode ini dikarenakan variabel dependen penelitian ini yaitu *corporate failure*, merupakan variabel dummy.

Model regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$CORP_FAIL = \alpha + \beta_1 OUT_DR + \beta_2 OUT_OWN + \beta_3 AUD_OP + \beta_4 REM_BM + \beta_5 AUCOM_IN + \beta_6 BO_SIZE + e$$

Dimana :

- α = konstanta
- CORP_FAIL = kemungkinan terjadinya *corporate failure* (variabel dummy, nilai 1 untuk perusahaan gagal dan nilai 0 untuk perusahaan tidak gagal)
- OUT_DR = proporsi komisaris independen yang dibandingkan dengan total jumlah komisaris perusahaan
- OUT_OWN = kepemilikan saham pada perusahaan yang diukur dari persentase kepemilikan saham oleh institusi dan public
- AUD_OP = opini audit (variabel dummy, nilai 0 untuk *unqualified opinion* dan *unqualified opinion with explanatory language* dan nilai 1 untuk opini modifikasi lainnya)
- REM_BM = remunerasi dewan komisaris diukur dari rasio jumlah remunerasi terhadap beban usaha perusahaan
- AUCOM_IN = jumlah anggota komite audit independen (variabel dummy, nilai 0 untuk jumlah >3 dan nilai 1 untuk jumlah ≤3)
- BO_SIZE = ukuran dewan direksi yang diukur dari total jumlah direktur dalam susunan dewan direksi perusahaan
- e = *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Objek Penelitian

Data yang sesuai dengan kriteria sampel dan mengandung informasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 147 perusahaan. Berdasarkan tabel 1, diperoleh 35 *failed companies* pada tahun 2011 dan 22 *failed companies* pada tahun 2012. Terdapat 58 *non-failed companies* pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 terdapat 32 *non-failed companies*.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Seluruh Perusahaan				Failed Companies				Non-Failed Company			
	Min	Max	Mean	Std	Min	Max	Mean	Std	Min	Max	Mean	Std
OUT_DR	.00	1.00	.40	.13	.00	.67	.41	.12	.20	1.00	.40	.13
OUT_OWN	.01	1.83	.78	.32	.02	1.00	.75	.31	.01	1.83	.80	.32
REM_BM	.00	.66	.08	.01	.00	.66	.07	.11	.00	.59	.08	.09
BO_SIZE	2.00	12.00	4.70	2.18	2.00	11.00	4.35	2.05	2.00	12.00	4.91	2.26
Valid N	147.00				57.00				90.00			

OUT_DR: komisaris independen; OUT_OWN: *outsiders ownership*; REM_BM: remunerasi dewan komisaris dan direksi; AUCOM_IN: komite audit independen; BO_SIZE: ukuran dewan direksi

Sumber: data yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.2 di atas terlihat bahwa komisaris independen (OUT_DR) pada seluruh perusahaan sampel memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai maksimum sebesar 1,00; nilai rata-rata sebesar 0,40; dan standar deviasi sebesar 0,13. Di mana nilai rata-rata yang lebih besar daripada standar deviasinya menunjukkan bahwa variasi data kecil. Nilai minimum untuk komisaris independen (OUT_DR) pada perusahaan yang termasuk *failed companies* sebesar 0,00; nilai maksimum sebesar 0,67; nilai rata-rata sebesar 0,41 dan berada diatas standar deviasinya yaitu

0,12. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Pada perusahaan yang tergolong *non-failed companies*, komisaris independen (OUT_DR) memiliki nilai minimum sebesar 0,20; nilai maksimum sebesar 1,00; nilai rata-rata sebesar 0,40 dan berada diatas standar deviasinya yaitu 0,13. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa *non-failed companies* memiliki proporsi komisaris independen yang lebih baik, yaitu sebesar 100%, bila dibandingkan dengan *failed companies* yang memiliki proporsi komisaris independen sebesar 67%.

Presentase *outside ownership* (OUT_OWN) seluruh perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 1,83; nilai rata-rata sebesar 0,78; dan berada diatas standar deviasinya yaitu 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Pada perusahaan yang termasuk *failed companies*, nilai minimum untuk persentase *outside ownership* (OUT_OWN) sebesar 0,02; nilai maksimum sebesar 1,00; nilai rata-rata sebesar 0,75 dan berada diatas standar deviasinya yaitu 0,31. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Presentase *outside ownership* (OUT_OWN) pada perusahaan yang tergolong *non-corporate failure* memiliki nilai minimum sebesar 0,01; nilai maksimum sebesar 1,83; nilai rata-rata sebesar 0,8 dan berada diatas standar deviasinya yaitu 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Dengan demikian, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata persentase *outside ownership* pada *non-failed companies* lebih tinggi, yaitu sebesar 80%, bila dibandingkan dengan *failed companies* yang memiliki persentase sebesar 75,4%.

Remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi (REM_BM) pada seluruh perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,00009; nilai maksimum sebesar 0,66; nilai rata-rata sebesar 0,08 dan berada diatas standar deviasinya yaitu 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Nilai minimum remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi (REM_BM) pada perusahaan yang termasuk *failed companies* sebesar 0,00009; nilai maksimum sebesar 0,66; nilai rata-rata sebesar 0,07 dan berada dibawah standar deviasinya yaitu 0,11. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data besar. Pada perusahaan yang tergolong *non-failed companies*, nilai minimum remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi (REM_BM) sebesar 0,00318; nilai maksimum sebesar 0,59; nilai rata-rata sebesar 0,08, dan berada dibawah standar deviasinya yaitu 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data besar. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran remunerasi pada *non-failed companies* lebih tinggi, yaitu sebesar 8%, bila dibandingkan dengan remunerasi pada *failed companies* yang hanya memiliki persentase sebesar 7%.

Seluruh perusahaan sampel memiliki nilai minimum sebesar 2 untuk ukuran direksi (BO_SIZE), nilai maksimum sebesar 12, nilai rata-rata 5 orang dan berada diatas standar deviasinya sebesar 2,19. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Nilai minimum ukuran direksi (BO_SIZE) pada perusahaan yang termasuk *failed companies* sebesar 2, nilai maksimum sebesar 11, nilai rata-rata 4 orang dan berada diatas standar deviasinya sebesar 2,05. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Pada perusahaan yang tergolong *non-failed companies*, nilai minimum ukuran direksi (BO_SIZE) 2, nilai maksimum sebesar 12, nilai rata-rata 5 orang dan berada diatas standar deviasinya sebesar 2,26. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa *non-failed companies* memiliki rata-rata ukuran direksi yang lebih baik, yaitu berjumlah 5 orang, bila dibandingkan dengan ukuran direksi pada *failed companies* yang berjumlah 4 orang.

Tabel 2
Statistik Deskriptif 2

AUD_OP	Seluruh Perusahaan		<i>Failed Companies</i>		<i>Non-Failed Companies</i>	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
0	95	64.6	10	17.5	85	94.4
1	52	35.4	47	82.5	5	5.6
Total	147	100	57	100	90	100

AUD_OP: opini auditor (0=opini wajar tanpa pengecualian dan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas ; 1=opini modifikasi lainnya)

Sumber: data yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 2 di atas, opini audit pada seluruh perusahaan didominasi oleh opini wajar tanpa pengecualian dan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas dengan persentase 64,6% dan opini modifikasi lainnya 35,4%. Pada perusahaan *failed companies*, opini modifikasi lainnya memiliki persentase sebesar 82,5% serta opini wajar tanpa pengecualian dan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas mendapatkan persentase sebesar 17,5%, sedangkan pada perusahaan *non-failed companies* persentase perusahaan yang mendapatkan opini modifikasi lainnya adalah sebesar 5,6% dan 94,4% untuk opini wajar tanpa pengecualian dan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas. Hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan *non-failed companies* mendapatkan opini audit yang lebih baik dibandingkan perusahaan *failed companies*.

Tabel 3
Statistik Deskriptif 3

AUCOM_IN	Seluruh Perusahaan		<i>Failed Companies</i>		<i>Non-Failed Companies</i>	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
1	134	91.2	50	87.7	84	93.3
0	13	8.8	7	12.3	6	6.7
Total	147	100	57	100	90	100

AUCOM_IN: komite audit independen (1= ≤3 anggota; 0= >3 anggota)

Sumber: data yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 3 di atas, jumlah komite audit independen pada seluruh perusahaan dengan anggota lebih dari tiga orang memiliki persentase sebesar 8,8% dan 91,2% adalah perusahaan dengan komite audit kurang dari atau sama dengan tiga orang. Pada *failed companies*, perusahaan dengan anggota lebih dari tiga orang memiliki persentase sebesar 12,3% dan perusahaan dengan komite audit kurang dari atau sama dengan tiga orang memiliki persentase 87,7%, sedangkan pada *non-failed companies* persentase perusahaan dengan anggota lebih dari tiga orang memiliki persentase sebesar 6,7% lalu sisanya 93,3% adalah perusahaan dengan komite audit kurang dari atau sama dengan tiga orang. Hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan *non-failed companies* dan *failed companies* hanya memiliki komite audit independen dengan anggota 3 orang.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penilaian kelayakan model regresi (*Goodness of Fit Test*), nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit test statistics* menunjukkan angka sebesar 0,546. Dengan demikian nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi logistik tersebut layak dipakai untuk menganalisis pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
OUT_DR	-.797	2.357	.113	1	.737	.453
OUT_OWN	-1.777	.920	3.729	1	.053 *	.169
AUD_OP	-4.541	.620	53.537	1	.000 **	.011
REM_BM	-.689	3.004	.053	1	.819	.502
AUCOM_IN	-.335	1.060	.100	1	.752	.715
BO_SIZE	-.193	.142	1.845	1	.174	.825
Constant	5.251	2.070	6.433	1	.011	190.820

OUT_DR: komisaris independen; OUT_OWN: *outsiders ownership*; AUD_OP: opini auditor;

REM_BM: remunerasi dewan komisaris dan direksi; AUCOM_IN: komite audit independen;

BO_SIZE: ukuran dewan direksi

** : signifikansi 5% * : signifikansi 10%

Sumber : data yang diolah, 2013

Hasil pengujian hipotesis pertama memberikan hasil bahwa hipotesis pertama tidak diterima. Penelitian ini memberikan bukti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Arah dari hasil penelitian ini sama dengan pernyataan hipotesis, yaitu negatif. Hal ini didukung dengan hasil statistik deskriptif (tabel 1) yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel *non-failed companies* memiliki nilai maksimal proporsi komisaris independen sebesar 100% sedangkan sampel *failed companies* memiliki nilai maksimal sebesar 67%. Namun demikian, keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Keberadaan komisaris independen ini tidak untuk menegakkan *corporate governance* yang baik tetapi hanya merupakan langkah formalitas yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi peraturan Bursa Efek Indonesia nomor IA Kep-305/BEJ/07-2004 yang menyatakan bahwa jumlah minimum komisaris independen adalah 30% dari jajaran dewan komisaris yang dipilih. Selain itu, hasil penelitian ini juga tidak mendukung pernyataan teori agensi, dimana tidak dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang lebih banyak dapat memperkecil kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Noorizkie (2013) dan tidak mendukung penelitian sejenis yang dilakukan oleh Hambrick dan D' Aveni (1992) dan Lakshan dan Wijekoon (2012) yang berpendapat bahwa dewan komisaris independen akan lebih obyektif dan independen serta bebas dari benturan kepentingan oleh manajemen perusahaan bila dibandingkan dengan anggota dewan komisaris yang lain.

Pengujian hipotesis kedua memberikan hasil bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini memberikan bukti adanya pengaruh negatif *outsider ownership* terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil ini didukung oleh statistik deskriptif (tabel 4.2) yang menunjukkan bahwa rata-rata persentase *outside ownership* pada *non-failed companies* (80%) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pada seluruh perusahaan (78,2%), selain itu persentase *failed companies* (75,4%) lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase pada seluruh perusahaan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2004) dan Nur' aeni (2010) yang menemukan adanya pengaruh signifikan, sedangkan Lakshan dan Wijekoon (2012) tidak mendukung hasil penelitian ini, dimana penelitiannya memberikan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan pihak independen di luar perusahaan dengan terjadinya *corporate failure*.

Pengujian hipotesis ketiga memberikan bukti bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya *corporate failure*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil statistik deskriptif (tabel 2) mendukung hasil penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa *non-failed companies* memiliki opini audit yang lebih baik bila dibandingkan dengan *failed companies*. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Altman dan McGough (1974) dan Menon dan Schwartz (1986) yang meneliti tentang hubungan antara opini auditor dengan terjadinya *financial failure*. Mereka menemukan bahwa opini auditor berpengaruh signifikan dalam mengidentifikasi terjadinya *corporate failure* dan opini audit dapat digunakan sebagai mekanisme regulasi eksternal dalam mengurangi kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sejenis yang dilakukan oleh Lakshan dan Wijekoon (2012).

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hal ini berarti hipotesis keempat tidak diterima. Bukti empiris tidak mendukung pernyataan teori agensi, karena belum tentu remunerasi yang lebih besar mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *corporate failure*, ataupun remunerasi yang lebih rendah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil penelitian ini juga tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak gagal membayar remunerasi lebih tinggi daripada perusahaan gagal atau perusahaan yang gagal membayar remunerasi lebih rendah daripada perusahaan yang tidak gagal. Sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa besarnya jumlah remunerasi yang diberikan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sejenis yang dilakukan oleh Lakshan dan Wijekoon (2012) bahwa remunerasi tidak signifikan dalam membedakan perusahaan yang gagal dengan perusahaan yang tidak gagal.. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Main *et al.* (1996) dan Conyon dan Peck (1998).

Pengujian hipotesis kelima memberikan hasil bahwa hipotesis kelima tidak diterima. Penelitian ini memberikan bukti bahwa komite audit independen tidak berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. keberadaan komite audit independen tidak mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kinney dan Martin (1994), yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit independen tidak menjamin adanya suatu efektifitas dalam proses *monitoring* yang dilakukannya. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sejenis yang dilakukan oleh Lakshan dan Wijekoon (2012).

Pengujian hipotesis keenam memberikan bukti bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keenam tidak diterima. Ukuran direksi tidak dapat menjamin mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak bisa disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *corporate failure*, ataupun ukuran dewan direksi yang lebih kecil dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sejenis yang dilakukan oleh Lakshan dan Wijekoon (2012) yang menyatakan bahwa besar kecilnya ukuran direksi tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Chaganti *et al.* (1985) dan Lamberto dan Rath (2008).

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari proporsi komisaris independen, *outside ownership*, opini audit, remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi, komite audit independen, dan ukuran dewan direksi terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *outside ownership* dan opini audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Sedangkan variabel proporsi komisaris independen, remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi, komite audit independen, dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan. *Pertama*, ada beberapa sektor industri perusahaan yang tidak dapat dimasukkan dalam sampel karena tidak memenuhi kriteria pengelompokan *sampling* (ukuran dan industri yang sama). *Kedua*, ada beberapa perusahaan yang *delisting*, sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian. *Ketiga*, ada beberapa laporan keuangan perusahaan yang tidak menyediakan data lengkap mengenai *corporate governance*, sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambah variabel lain, yaitu variabel internal atau variabel eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya *corporate failure*. *Kedua*, peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi dengan menambahkan perusahaan non-manufaktur dan perusahaan keuangan lainnya. *Ketiga*, peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

REFERENSI

- Altman, E. I., McGough, T., 1974. Evaluation of a Company as a Going Concern. *Journal of Accounting, Auditing, and Finance*, Vol. 6, No. 4, h. 4-19.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Chaganti, R. S., Mahajan, V., Sharma, S., 1985. Corporate Board Size, Composition, and Corporate Failures in Retailing Industries. *Journal of Management Studies*, Vol. 22, No. 4, h. 400-417.
- Conyon, M. J., Peck, S. I., 1998. Board Control, Remuneration Committee, and Top Management Compensation. *Academy of Management Journal*, Vol. 41, No. 2, h. 146-57.

- Copeland, Thomas E., J, Fred Weston., 1992. *Financial Theory and Corporate Policy*. 5th ed. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Copp, Stephen. 2011. *The Economic (and Moral), Case Against Capping Directors Remuneration*. London: The Institute Economic Affair.
- Fama, E. F., Jensen, M. N., 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, Vol.26, h. 301-325.
- Hambrick, D.C., D'Aveni, R. A., 1992. Top Team Deterioration as Part of The Downward Spiral of Large Corporate Bankruptcies. *Journal of Management Science*, h.1445-1466.
- Jensen, M. C. 1993. The Modern Industrial Revolution, Exit, and The Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, Vol. 48, 831-880.
- Kinney, W. R., Martin, R. D., 1994. Does Auditing Reduce The Bias in Financial Reporting? A Review of Audit Related Adjustment Studies. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 13, No. 1, h. 149-156.
- Lakshan, A. M. I dan Wijekoon, W. M. H. N., 2012. Corporate Governance and Corporate Failure. *Journal of Economics and Finance*, h.191-198.
- Lamberto, A. P., dan Rath, S., 2008. The Survival of Initial Public Offerings In Australia, Working Paper, Curtin University of Technology.
- Main, B. G. M., Bruce, A., Buck, T., 1996. Total Board Remuneration and Company Performance. *The Economic Journal*, Vol. 106, No. 439, h. 1627-1644.
- Mark S. Beasley. 1996. An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, Vol. 71, No.4, h. 443-465.
- Menon, K., Schwartz, K., 1986. The Auditor's Report for Companies Facing Bankruptcy. *The Journal of Commercial Bank Lending*, h. 42-52.
- Noorizkie, Giska. 2013. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Skripsi S1*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Nuraeni, Dini. 2010. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Kinerja Perusahaan, *Skripsi S1*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Sastriana, Dian. 2013. Pengaruh Corporate Governance dan Firm Size terhadap Perusahaan yang Mengalami Kesulitan Keuangan (Financial Distress). *Skripsi S1*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Wagner, J. A., Stimpert, J. L., Fubara, E. I., 1978. Board Composition and Organizational Performance: Two Studies of Insider/Outsider Effects. *Journal of Management Studies*, Vol. 35, 655-677.
- Wardhani, Ratna. 2006. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No.1, h. 95-114.